

Article

Analisis Alternatif Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Dalam Sistem Pengelolaan Sampah di Kelurahan Keramasan Kota Palembang

Ayman Ashary Dabbara¹, Ratna Yosefin Eurolia², Monica Mutiara Nazarani³, Natalia Magdalena Nababan⁴, Galuh Efnol Adzan⁵

¹²³⁴⁵Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya

* *Correspondensi Penulis:* monicamutiara95@gmail.com

Abstract: *This study analyzes alternative community-oriented waste management policies in Keramasan Village, Palembang. The focus of this study is to identify problems, analyze obstacles in policy implementation, and formulate appropriate policy suggestions. The methodology applied was descriptive qualitative research, with data collected through observation, in-depth interviews with seven informants, and document studies. The analysis was carried out by linking the field results with the Integrated Sustainable Waste Management (ISWM) framework along with six policy evaluation criteria according to Dunn. Based on the results of the research, it is known that Keramasan Village does not have a waste storage place (TPS/TPS3R), limited transportation services due to lack of vehicles, and low public awareness about waste separation, so that disposal into the river and incineration become a common practice. This study offers four policy alternatives and then evaluated using assessments with Dunn criteria, the result is that community-based waste management gets the highest score and is recommended as the main choice, although it needs to be combined with infrastructure provision, digitalization, and law enforcement for sustainability. Integrated implementation is expected to reduce waste accumulation, improve environmental quality, and increase the capacity of local communities in the long term. This research provides a foundation for the policies of the Palembang City Government and local stakeholders to design interventions that focus on community empowerment and infrastructure development.*

Keywords: *River, Waste Management, Integrated Sustainable Waste Management (ISWM), Community-Based, Policy Evaluation.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis alternatif kebijakan pengelolaan sampah yang berorientasi pada masyarakat di Kelurahan Keramasan, Palembang. Fokus dari studi ini adalah untuk mengenali masalah, menganalisis hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, serta merumuskan saran kebijakan yang tepat. Metodologi yang diterapkan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan tujuh orang informan, dan studi dokumen. Analisis dilakukan dengan menghubungkan hasil lapangan dengan kerangka *Integrated Sustainable Waste Management* (ISWM) beserta enam kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Kelurahan Keramasan belum memiliki tempat penyimpanan sampah (TPS/TPS3R), layanan pengangkutan terbatas akibat kekurangan kendaraan, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pemisahan sampah, sehingga pembuangan ke sungai dan pembakaran menjadi praktik yang umum. Penelitian ini menawarkan empat alternatif kebijakan kemudian dievaluasi menggunakan penilaian dengan kriteria Dunn, hasilnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat mendapatkan skor tertinggi dan direkomendasikan sebagai pilihan utama, meskipun perlu digabungkan dengan penyediaan infrastruktur, digitalisasi, dan penegakan hukum demi keberlanjutan. Implementasi yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi akumulasi sampah, memperbaiki kualitas lingkungan, dan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dalam jangka panjang. Penelitian ini memberikan landasan bagi kebijakan Pemerintah Kota Palembang serta pemangku kepentingan lokal untuk merancang intervensi yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan infrastruktur.

Kata Kunci: Sungai, Pengelolaan Sampah, *Integrated Sustainable Waste Management* (ISWM), Berbasis Masyarakat, Evaluasi Kebijakan.

PENDAHULUAN

Permasalahan pengelolaan sampah merupakan isu lingkungan global yang semakin mendesak untuk diselesaikan. Menurut laporan United Nations Environment Programme (Environment, 2024), dunia menghasilkan lebih dari 2,3 miliar ton sampah padat setiap tahun, namun hanya sekitar 19% yang berhasil didaur ulang. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi memperburuk laju timbulan sampah, terutama di negara berkembang yang sistem pengelolaan sampahnya masih terbatas. Oleh karena itu, organisasi internasional seperti UN-Habitat dan World Bank menekankan penerapan prinsip Circular Economy dan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) untuk mengurangi tekanan lingkungan serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan) dan SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab).

Indonesia menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2024 timbulan sampah nasional mencapai 38,17 juta ton (SIPSN, 2024), dengan 46,8% berasal dari sampah rumah tangga. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 yang menegaskan pentingnya pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara komprehensif dan berkelanjutan.

Kota Palembang sebagai kota metropolitan dengan jumlah penduduk lebih dari 1,6 juta jiwa menghadapi permasalahan kompleks dalam sistem pengelolaan sampah. Berdasarkan laporan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang (2025), dari total 225 unit armada pengangkut sampah yang dibutuhkan, hanya 141 unit yang beroperasi efektif, sehingga pengangkutan sampah tidak berjalan optimal (Jayawisuda, 2025). Akibatnya, penumpukan sampah di lingkungan padat penduduk seperti Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, menjadi masalah kronis yang berdampak pada pencemaran air, udara, dan estetika lingkungan. Minimnya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan belum adanya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPS3R) turut memperparah kondisi ini, mendorong masyarakat membuang sampah ke sungai atau lahan terbuka (Deselta & Nugroho, 2021).

Selain faktor infrastruktur, perilaku dan kesadaran masyarakat juga menjadi kendala besar. Berdasarkan penelitian Puspandari, Taufik, & Putri (2023) dalam (Puspandari dkk., 2023), perilaku pembuangan sampah ke sungai di wilayah Kertapati, termasuk Kelurahan Keramasan, dipengaruhi oleh kurangnya sarana pengelolaan dan rendahnya edukasi lingkungan. Warga cenderung membuang sampah di depan rumah atau ke aliran sungai karena tidak adanya petugas pengangkut dan TPS terdekat. Di sisi lain, implementasi regulasi seperti Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah masih lemah akibat keterbatasan anggaran dan koordinasi antarinstansi (Alawiyah, 2024).

Penumpukan sampah memicu munculnya genangan air dan nyamuk, meningkatkan risiko penyakit seperti demam berdarah dan diare, serta menurunkan kualitas hidup warga. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan pengelolaan sampah yang terintegrasi, partisipatif, dan berbasis pemberdayaan masyarakat lokal. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengangkutan dan pengelolaan sampah yang efisien, dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Keramasan, Kota Palembang. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi kebijakan yang dikaitkan dengan ketiadaan tempat penampungan sampah sementara dan dampaknya terhadap perilaku masyarakat di kawasan daerah aliran sungai. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di tingkat kelurahan, khususnya di Kelurahan Keramasan, Kota Palembang.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Evaluasi Kebijakan William N. Dunn

Evaluasi kebijakan adalah langkah penting dalam rangkaian kebijakan publik yang bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sebuah kebijakan berhasil mencapai target yang telah ditentukan serta menyediakan dasar untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Menurut William N. Dunn (2003), evaluasi kebijakan merupakan proses penilaian yang terstruktur mengenai nilai, keuntungan, dan efek dari sebuah kebijakan publik setelah pelaksanaannya. Evaluasi kebijakan digunakan untuk menilai seberapa baik alternatif kebijakan yang diusulkan dapat menyelesaikan permasalahan, dalam konteks penelitian ini berfokus pada isu pengangkutan dan pengelolaan sampah di Kelurahan Keramasan dengan cara yang tepat, efisien, adil, dan dapat diimplementasikan dengan baik. Berdasarkan teori William N. Dunn (2003) sebagaimana diungkapkan dalam (Dewi & Al-Hamdi, 2021), terdapat enam kriteria utama yang bisa dipakai dalam mengevaluasi kebijakan, diantaranya:

1. Efektivitas, yaitu sejauh mana tujuan akhir dari suatu kebijakan dapat dicapai.
2. Efisiensi, yaitu seberapa banyak usaha yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, di mana usaha yang lebih sedikit tetap dapat menghasilkan hasil yang sama baiknya.
3. Kecukupan, yaitu sejauh mana alternatif kebijakan yang dirancang mampu memenuhi nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang masih belum terpenuhi.
4. Kesamaan, artinya manfaat dari kebijakan dapat dibagikan secara adil dan merata.
5. Responsivitas, yaitu seberapa baik kebijakan dapat merespons dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
6. Ketepatan, yaitu nilai atau relevansi dari tujuan program serta kekuatan asumsi yang menjadi dasar tujuan tersebut

Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn dalam (Budi Winarno, 2008:146-147) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang berasal dari keputusan yang telah diambil sebelumnya. Tindakan-tindakan ini meliputi upaya untuk merubah keputusan tersebut menjadi kegiatan praktis dalam periode waktu tertentu serta untuk meneruskan usaha-usaha dalam mencapai perubahan, baik yang besar maupun kecil, yang ditetapkan oleh kebijakan yang dilaksanakan oleh organisasi publik, dengan tujuan mencapai target yang telah ditentukan (Tuhumury dkk., 2024). Menurut Zainal Abidin (2019) dalam (Nawang Sari dkk., 2023), suksesnya pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh dua elemen penting, yaitu elemen internal dan elemen eksternal. Elemen internal mencakup kebijakan yang akan dilaksanakan serta faktor-faktor yang mendukung, sedangkan elemen eksternal berkaitan dengan kondisi di sekitar dan pihak-pihak yang terlibat. Implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan tahap pelaksanaan keputusan yang telah disetujui menjadi tindakan dan aktivitas nyata dalam periode waktu tertentu, yang dioperasikan oleh lembaga publik untuk mencapai sasaran atau perubahan yang diharapkan.

Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Menurut Alam, dkk. dalam (Raditia & Erlina, 2025), pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat adalah cara pengelolaan yang menekankan pada partisipasi aktif warga dalam hal mengurangi, memilah, menggunakan kembali, dan mendaur ulang limbah di area tempat tinggal mereka. Pendekatan ini membantu meringankan beban pemerintah dan mendorong peningkatan kesadaran akan lingkungan serta kemandirian masyarakat dalam merawat kebersihan dan kesehatan lingkungan. Sedangkan menurut Simamora dalam (Purwendah dkk., 2022) Pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat merupakan metode pengelolaan sampah yang mengutamakan peran aktif dari masyarakat itu sendiri. Pemerintah serta institusi lainnya berfungsi hanya sebagai pendorong dan penunjang. Pengelolaan lingkungan yang baik memerlukan dukungan dan pelaksanaan inisiatif yang berbasis pada masyarakat sebagai strategi untuk memberdayakan mereka serta meningkatkan akses terhadap sumber daya lingkungan yang vital, khususnya tanah, infrastruktur, dan layanan.

Menurut Marlina dalam (Marlina, 2024), Pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat dapat dimulai dengan tekad untuk melindungi lingkungan dengan cara yang lebih bijaksana. Ini berawal dari kesadaran individu untuk tidak membuang sampah secara sembarangan dan menyadari pentingnya memisahkan jenis sampah. Setiap orang wajib paham bahwa tindakan kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya dan melakukan daur ulang, bisa memberikan pengaruh yang besar terhadap kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan. Pemerintah juga harus aktif

menyediakan sarana yang cukup untuk pengelolaan sampah, seperti lokasi penampungan sementara yang strategis dan sistem pengangkutan yang efektif. Selain itu, kebijakan yang adil dan mencakup semua pihak perlu diterapkan, agar seluruh lapisan masyarakat, terutama yang paling rentan, dapat menikmati manfaat dari pengelolaan sampah yang baik.

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah yang melibatkan peran serta masyarakat adalah metode pengelolaan limbah yang muncul dari kesadaran warga untuk bertanggung jawab atas sampah yang mereka hasilkan dari aktivitas rumah tangga atau kegiatan lainnya. Sampah tersebut kemudian dipisahkan dan diklasifikasikan berdasarkan jenisnya sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik.

Tempat Penampungan Sementara (TPS)

Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu (JDIH Kementerian Keuangan, 2012). Menurut Nugroho (2018) dalam (Diyah dkk., 2025) Tempat Penampungan Sementara merupakan fasilitas yang berfungsi sebagai titik pengumpulan awal sampah sebelum diangkut ke fasilitas pengolahan atau pembuangan akhir. TPS perlu dirancang dengan baik untuk meminimalkan dampak negatif seperti bau, pencemaran air dan tanah, dan penyebaran penyakit. Dapat disimpulkan bahwa keberadaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) menjadi bagian penting dalam sistem pengelolaan sampah secara terpadu karena berperan sebagai penghubung antara sumber sampah dan tahap pengolahan berikutnya. Apabila pengelolaan TPS tidak dilakukan dengan baik, proses pengolahan sampah dapat terhalang dan berpotensi menimbulkan masalah bagi lingkungan serta kesehatan publik. Oleh karena itu, dalam ranah kebijakan pengelolaan sampah, TPS dipandang sebagai infrastruktur utama yang mendukung efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan sistem pengelolaan sampah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, sehingga pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh mengenai isu pengelolaan sampah di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui pengamatan langsung dan wawancara. Pengamatan dilakukan untuk memahami keadaan lingkungan di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang. Wawancara dilakukan secara langsung kepada tujuh warga setempat yang berusia antara 25 hingga 50 tahun, yang dijabarkan dalam Tabel 1. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan adanya tempat pembuangan sampah, kendaraan pengangkut sampah, cara pengelolaan sampah oleh masyarakat, serta kegiatan gotong royong yang dilaksanakan di Kelurahan Keramasan.

Tabel 1
Karakteristik Informan Penelitian

No.	Nama	Umur	Jenis Kelamin
1.	Lilis	30 Tahun	Perempuan
2.	Santi	35 Tahun	Perempuan
3.	Kartini	40 Tahun	Perempuan
4.	Sigi Latifah	36 Tahun	Perempuan
5.	Rosalina	47 Tahun	Perempuan
6.	Tiara	27 Tahun	Perempuan
7.	Rahma	38 Tahun	Perempuan
Total			7 Orang

Tabel 2
Daftar Pertanyaan Wawancara

No.	Pertanyaan Wawancara
1.	Apakah di lingkungan tempat tinggal Anda terdapat TPS atau TPS3R?
2.	Apakah terdapat layanan pengangkutan sampah secara rutin?
3.	Bagaimana cara Anda membuang sampah rumah tangga setiap hari?
4.	Apakah Anda melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik?
5.	Apakah pernah ada kegiatan gotong royong kebersihan di Kelurahan Keramasan?

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah daerah, dan artikel jurnal yang relevan dengan topik pengelolaan sampah. Sedangkan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan mengaitkan temuan lapangan pada kerangka *Integrated Sustainable Waste Management (ISWM)* serta kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Kelurahan Keramasan

Kelurahan Keramasan yang terletak di Kecamatan Kertapati, kota Palembang, terutama di Jalan Haji Sarkowi B, merupakan sebuah desa atau pemukiman warga yang berlokasi di dekat sungai kecil. Sungai ini adalah bagian dari aliran Sungai Musi yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai buruh bangunan atau nelayan yang mencari ikan di sungai. Penelitian dilakukan dengan fokus pada RT 20, 21, dan 30 di kelurahan ini, yang banyak diwarnai oleh aktivitas masyarakat di sekitar sungai. Daerah ini ditandai oleh pemukiman yang berada di tepi sungai, di mana kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh keberadaan sungai. Air sungai digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga, seperti mencuci, dan sebagian penduduk juga menggunakannya untuk mandi. Suasana di perkampungan yang padat penduduk ini memanfaatkan jembatan-jembatan kecil sebagai akses untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya.

Gambar 1
Lokasi Peta Kelurahan Keramasan



Sumber: Google Earth, 2025.

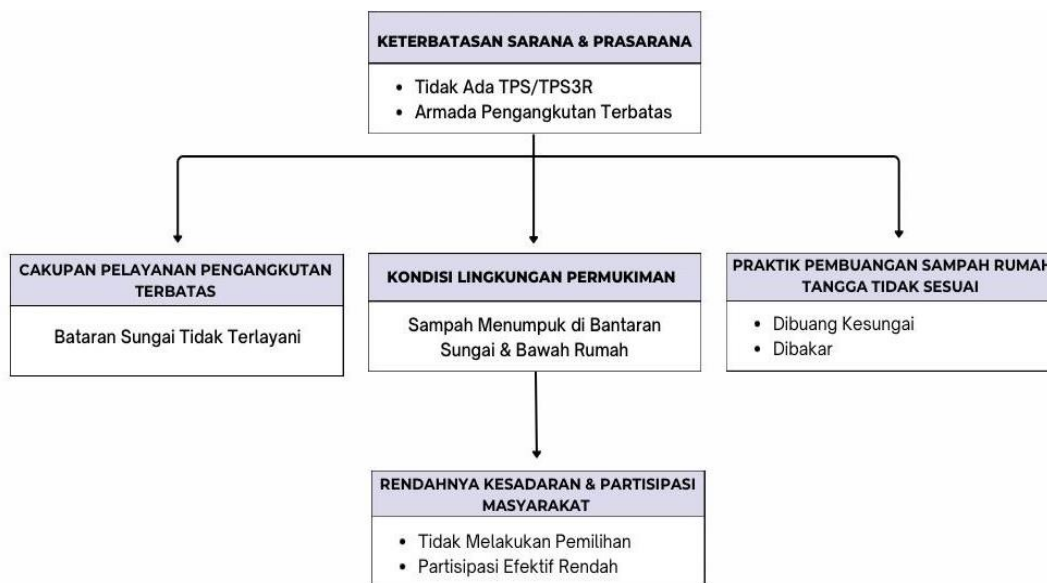
Gambar 1 memperlihatkan area keramasan yang umumnya dibangun di atas aliran sungai, sehingga penduduk masih kerap membuang sampah secara langsung ke dalam sungai atau di bawah tempat tinggal mereka.

Permasalahan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Keramasan

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan masyarakat Kelurahan Keramasan, ditemukan sejumlah permasalahan utama dalam pengelolaan sampah di kawasan permukiman pesisir sungai. Permasalahan tersebut terutama berkaitan dengan keterbatasan layanan

persampahan, kondisi lingkungan fisik, serta praktik pembuangan sampah rumah tangga yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan. Hasil temuan menunjukkan bahwa hingga saat penelitian dilakukan, Kelurahan Keramasan belum memiliki Tempat Pembuangan Sementara (TPS) maupun TPS3R. Keterbatasan armada pengangkut sampah menyebabkan wilayah permukiman di bantaran sungai tidak terlayani oleh sistem pengangkutan resmi. Akibatnya, masyarakat memilih cara alternatif seperti membuang sampah langsung ke sungai, menumpuk sampah di bawah rumah panggung, atau membakar sampah di sekitar tempat tinggal. Sebagai bentuk penyajian data yang lebih ringkas dan mudah dipahami, identifikasi permasalahan pengelolaan sampah disajikan dalam bentuk diagram.

Diagram 1
Identifikasi Permasalahan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Keramasan



Sumber : Data Penulis, 2025

Diagram 1 menggambarkan lima isu utama yang saling terkait, yaitu kurangnya fasilitas dan infrastruktur pengelolaan sampah, terbatasnya jangkauan layanan pengangkutan sampah, pencemaran lingkungan di kawasan permukiman, cara pembuangan sampah rumah tangga yang tidak tepat, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi dari masyarakat. Semua isu ini membentuk suatu sistem masalah dalam pengelolaan sampah di tingkat lokal dan menjadi landasan untuk analisis lebih lanjut di bagian berikutnya.

Temuan yang didapat di lapangan juga didukung oleh data tambahan serta pernyataan resmi dari pemerintah daerah. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palembang, Akhmad Mustain, jumlah kendaraan pengangkut sampah yang tersedia saat ini baru mencapai 141 unit, sementara kebutuhan yang ideal adalah 225 unit (Jayawisuda, 2025). Kekurangan jumlah armada ini berpengaruh langsung terhadap kurang efisiennya pengangkutan sampah di beberapa area, termasuk di Kelurahan Keramasan.

Pelayanan pengangkutan sampah di kelurahan Keramasan hanya mencakup daerah yang dekat dengan jalan utama, sedangkan wilayah padat yang berada di tepi sungai belum mendapatkan layanan. Hal ini mengakibatkan penumpukan sampah di bawah rumah penduduk dan memperburuk kondisi lingkungan permukiman. Selain itu, hanya ada satu tempat pembuangan sampah yang dikelola oleh komunitas Rumah Belajar Ceria untuk menunjang kegiatan. Lokasinya berkisar 150 meter dari permukiman dengan metode penanganan melalui pembakaran akibat tidak adanya armada pengangkut yang beroperasi secara teratur. Tempat pembuangan tersebut dapat dilihat pada gambar 2.

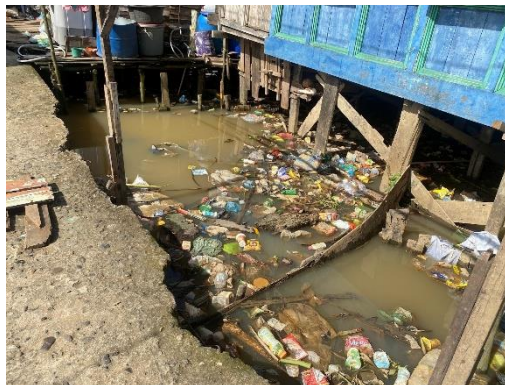
Gambar 2
Tempat Pembuangan Sampah yang Disediakan
Komunitas Rumah Belajar Ceria



Sumber: Data Penulis, 2025.

Temuan di lapangan tersebut juga dikuatkan oleh dokumentasi visual yang diperoleh dari observasi yang menunjukkan kondisi nyata lingkungan permukiman serta praktik pembuangan sampah oleh masyarakat.

Gambar 3
Kondisi Sampah saat Sungai dalam Keadaan Pasang



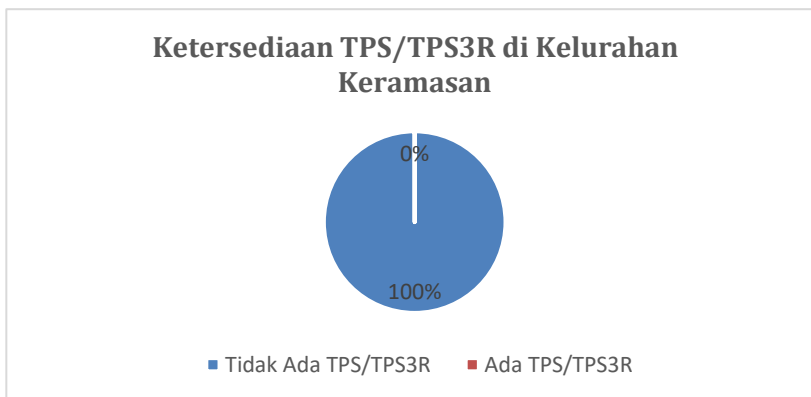
Sumber : Data Penulis, 2025.

Gambar 4
Kondisi Sampah saat Sungai dalam Keadaan Surut

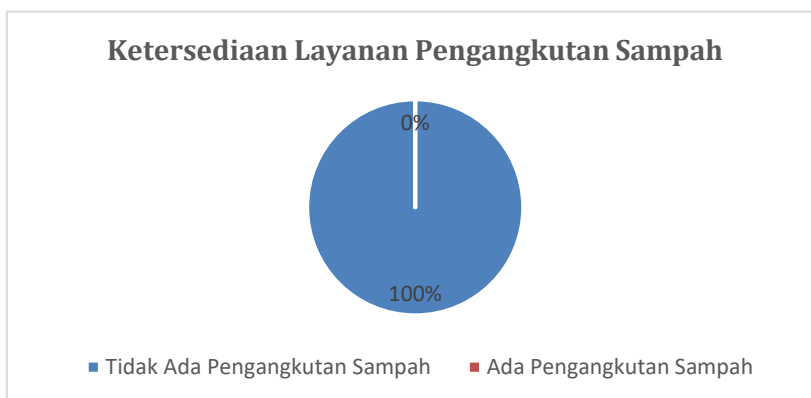


Sumber : Data Penulis, 2025.

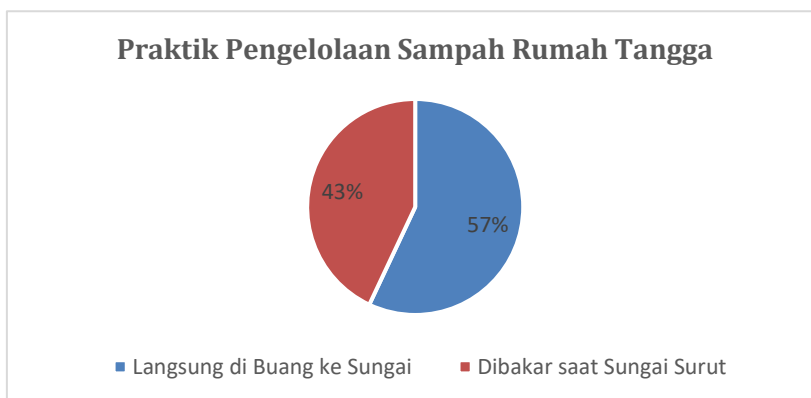
Hasil dari pengamatan lapangan dan wawancara mendalam dengan tujuh informan menunjukkan bahwa pengelolaan limbah di Kelurahan Keramasan masih banyak dilakukan melalui cara pembuangan sampah yang tidak terorganisir.



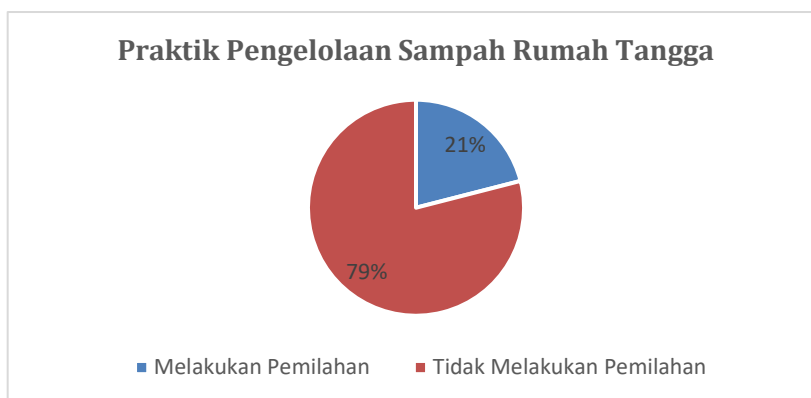
Berdasarkan hasil wawancara, 100% responden menyatakan bahwa tidak terdapat fasilitas TPS maupun TPS3R di lingkungan tempat tinggal mereka.



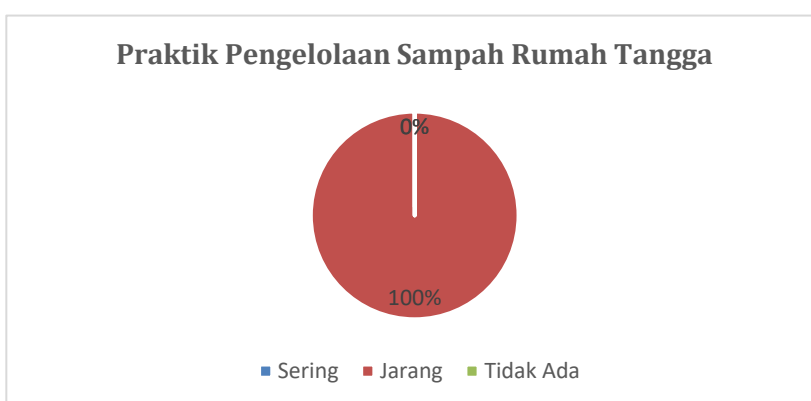
Seluruh responden (100%) juga menyatakan bahwa tidak terdapat layanan pengangkutan sampah secara rutin di wilayah Kelurahan Keramasan.



Sebanyak 57% responden membuang sampah langsung ke sungai, sedangkan 43% membakar sampah saat kondisi air surut. Artinya dari sebanyak 7 responden, 3 diantaranya memilih untuk melakukan pembakaran sampah saat sungai dalam keadaan surut. Sedangkan 4 responden lainnya memilih untuk membuang sampah secara langsung ke sungai.



Hanya 29% responden yang melakukan pemilahan sampah sebelum dibakar, sementara 71% tidak melakukan pemilahan sama sekali. Artinya dari sebanyak 7 responden, 2 diantaranya telah melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik sebelum dibakar saat sungai dalam keadaan surut. Sedangkan 5 responden lainnya tidak melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik.



Seluruh responden menyatakan bahwa kegiatan gotong royong kebersihan memang ada, namun dilaksanakan sangat jarang dan tidak terjadwal secara rutin.

Mayoritas informan mengungkapkan bahwa mereka membuang sampah rumah tangga setiap hari ke sungai atau membakarnya di sekitar rumah saat sungai sedang surut. Tindakan ini diambil karena tidak adanya fasilitas Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di area tempat tinggal serta keterbatasan kendaraan untuk mengangkut sampah yang melayani daerah tersebut. Beberapa informan melaporkan bahwa mereka tidak mengetahui cara lain untuk membuang sampah selain ke sungai, terutama bagi mereka yang tinggal di tepi sungai. Pembuangan langsung ke sungai menyebabkan sampah mengapung di permukaan air, seperti ditunjukkan pada gambar 3, dan saat air surut, sampah tersebut masih tertinggal di bawah rumah penduduk, seperti terlihat pada gambar 4.

Temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa layanan pengangkutan sampah hanya mencakup area permukiman yang berdekatan dengan jalan utama. Informan yang tinggal di kawasan padat di tepi sungai mengatakan bahwa sampah mereka jarang atau bahkan tidak pernah diambil oleh petugas kebersihan. Situasi ini berujung pada penumpukan sampah di bawah rumah panggung dan sekitar tepi sungai. Penumpukan ini menimbulkan bau tidak sedap, menurunkan kualitas lingkungan, dan dapat meningkatkan risiko penyakit yang berkaitan dengan lingkungan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah masih tergolong rendah. Kebanyakan informan mengakui bahwa mereka belum pernah memilah sampah rumah tangga karena kurangnya fasilitas dan minimnya edukasi lingkungan. Kegiatan bersih-bersih secara gotong royong tidak dilaksanakan secara teratur dan biasanya hanya dilakukan pada saat-saat tertentu. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah belum menjadi prioritas utama bersama di masyarakat. Selain itu, menurut hasil observasi dan pernyataan informan, Kelurahan Keramasan belum memiliki organisasi pengelola sampah berbasis komunitas, seperti bank sampah atau kelompok swadaya masyarakat yang khusus menangani masalah sampah. Ketidakhadiran organisasi tersebut membuat pengelolaan sampah sepenuhnya bergantung pada usaha individu.

Permasalahan pengangkutan dan pengelolaan sampah di Kelurahan Keramasan tidak terlepas dari berbagai regulasi yang telah ditetapkan baik di tingkat nasional maupun daerah. Namun, lemahnya implementasi dan pengawasan menjadi penyebab utama belum optimalnya kebijakan ini dijalankan. Berikut adalah beberapa regulasi yang relevan

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-Undang ini menjadi dasar utama pengelolaan sampah di Indonesia. Undang-Undang ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan sampah yang harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, yang mencakup pengurangan dan penanganan sampah. Pasal 13 menekankan kewajiban pemerintah daerah dalam memfasilitasi infrastruktur pengelolaan serta pemisahan sampah, termasuk lokasi penampungan sementara dan kendaraan untuk mengangkut sampah (JDIH BPK, 2008).
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan ini merinci pelaksanaan dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, yang mencakup kewajiban masyarakat untuk memilah sampah berdasarkan tipe, jumlah, dan karakteristiknya. Namun, di Kelurahan Keramasan, ketentuan ini belum diterapkan karena kurangnya sosialisasi serta tidak adanya sarana pendukung seperti TPS dan TPS3R (JDIH BPK, 2012).
- 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Peraturan ini menjadi pedoman pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah. Peraturan ini mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sampah secara ekonomi sirkular melalui bank sampah. Akan tetapi, di Kelurahan Keramasan belum ada organisasi atau komunitas yang menerapkan sistem ini, sehingga potensi pemberdayaan ekonomi dari pengelolaan sampah masih belum dimanfaatkan dengan baik (JDIH BPK, 2021).
- 4) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam Pasal 19 dari peraturan ini, dinyatakan bahwa pemerintah daerah harus melaksanakan pengelolaan sampah serta menyediakan sarana angkut sampah yang ramah lingkungan dan berfungsi untuk menjaga kesehatan masyarakat. Peraturan ini mengatur tanggung jawab Pemerintah Kota Palembang dalam penyediaan fasilitas pengangkutan dan pengolahan sampah, serta pemberian sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Meskipun demikian, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan sanksi, keterbatasan armada pengangkut sampah, keterbatasan jumlah petugas pengawas, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik (JDIH BPK, 2015).

Kondisi daerah Keramasan yang terletak di area rendah dengan pola pasang surut air mengakibatkan sampah mudah terbawa arus dan menumpuk di bawah rumah penduduk. Kebijakan pengelolaan sampah yang ada belum memperhitungkan aspek lingkungan ini. Meskipun sudah ada berbagai regulasi mulai dari tingkat nasional hingga daerah, pelaksanaannya masih lemah karena kurangnya pengawasan, sanksi, dan pembinaan masyarakat secara terus menerus. Pemerintah daerah lebih bersikap reaktif ketimbang bersifat pencegahan dalam mengatasi isu kebersihan lingkungan.

Analisis Berdasarkan Model Integrated Sustainable Waste Management (ISMW)

Management Integrated Sustainable Waste Management (ISMW) merupakan kerangka konseptual pengelolaan sampah yang dikembangkan oleh Anschutz, IJgosse, dan Scheinberg (2004), yang menekankan keterkaitan antara pemangku kepentingan, sistem pengelolaan sampah, serta aspek pendukung sosial, kelembagaan, dan teknis (Fadilla & Kriswibowo, 2022). Berdasarkan model ISWM, permasalahan pengelolaan sampah di Kelurahan Keramasan terjadi pada seluruh elemen sistem. Dari sisi pemangku kepentingan, koordinasi antarinstansi masih lemah. Dari sisi sistem pengelolaan, tahapan pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan belum berjalan secara optimal. Sementara itu, aspek pendukung seperti edukasi lingkungan dan perubahan perilaku masyarakat belum terpenuhi secara memadai.

Analisis Alternatif Kebijakan Pengelolaan Sampah

Menurut hasil dan temuan yang diperoleh dari penelitian di Kelurahan Keramasan, peneliti menyusun empat alternatif kebijakan pengelolaan sampah yang dinilai relevan dengan kondisi Kelurahan Keramasan. Pemerintah Kota Palembang dapat mempertimbangkan beberapa alternatif kebijakan sebagai berikut.

1. Alternatif 1: Pembangunan Infrastruktur Persampahan Terpadu

Alternatif kebijakan pertama berfokus pada pembangunan serta optimalisasi infrastruktur persampahan melalui penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 3R (TPS3R) di Kelurahan Keramasan. Pemerintah Kota Palembang, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), diharapkan menambah jumlah armada pengangkut, memperbaiki rute layanan, serta menetapkan zona pengangkutan berdasarkan tingkat kepadatan penduduk. Sistem ini bekerja secara hierarkis yaitu masyarakat membuang sampah ke TPS terdekat, petugas mengangkut sampah sesuai jadwal pada zona masing-masing, kemudian sampah tersebut diolah di TPS3R untuk dilakukan daur ulang, pengomposan, dan pembuangan residu ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sukawinatan.

Penerapan alternatif kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana persampahan sekaligus memperbaiki sistem pengangkutan sampah agar tidak lagi terjadi penumpukan sampah di lingkungan pemukiman warga. Keunggulan utama dari kebijakan ini adalah kemampuannya memberikan dampak yang relatif cepat dan nyata dalam mengurangi tumpukan sampah serta meningkatkan efisiensi sistem pengangkutan dan pengelolaan sampah secara keseluruhan. Namun demikian, alternatif ini juga memiliki keterbatasan, terutama karena membutuhkan alokasi anggaran yang besar untuk pembangunan infrastruktur fisik dan pengadaan armada pengangkut. Selain itu, tanpa pengawasan yang memadai dan dukungan partisipasi masyarakat, infrastruktur yang dibangun berpotensi tidak dimanfaatkan secara optimal.

2. Alternatif 2: Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Community-Based Waste Management)

Alternatif kebijakan kedua menekankan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan bank sampah dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di setiap RT/RW. Mekanisme kerjanya dimulai dari rumah tangga, di mana warga melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik secara mandiri. Sampah anorganik kemudian dikumpulkan oleh KSM dan ditimbang di bank sampah, sedangkan hasil penjualan dari sampah yang bernilai ekonomi dikembalikan kepada warga dalam bentuk insentif atau tabungan lingkungan. Sementara itu, sampah organik diolah menjadi kompos yang dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Dalam skema ini, pemerintah berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan pelatihan, pendampingan, serta dukungan logistik seperti timbangan, karung, dan peralatan daur ulang sederhana untuk mendukung keberlanjutan kegiatan pengelolaan sampah di tingkat lokal.

Tujuan utama dari alternatif kebijakan ini adalah meningkatkan kesadaran dan kepedulian lingkungan masyarakat, memperkuat kemandirian warga dalam pengelolaan sampah, serta menciptakan nilai ekonomi dari penerapan prinsip *reduce, reuse, dan recycle* (3R). Keunggulan kebijakan ini terletak pada kemampuannya mendorong partisipasi aktif masyarakat dengan biaya yang relatif rendah karena berbasis swadaya, sekaligus memiliki potensi keberlanjutan yang tinggi karena menumbuhkan rasa memiliki di tingkat lokal. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi pendampingan dan dukungan pemerintah, serta memerlukan proses yang bertahap dalam membangun kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat.

3. Alternatif 3: Digitalisasi Sistem Pengelolaan dan Pengawasan Sampah

Alternatif kebijakan ini mengusulkan penerapan sistem digital berbasis web dan aplikasi smartphone untuk memperkuat koordinasi, transparansi, serta efektivitas pengelolaan sampah di Kelurahan Keramasan. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat memantau jadwal pengangkutan sampah, melaporkan secara langsung lokasi penumpukan sampah, serta memberikan umpan balik terhadap kinerja petugas kebersihan. Seluruh laporan yang masuk akan terintegrasi secara real-time ke dalam dashboard Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palembang yang memuat data lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), rute armada pengangkut, status pengangkutan, dan kondisi lapangan. Setelah laporan diverifikasi, petugas DLH dapat segera

mengarahkan armada terdekat untuk melakukan penanganan, sekaligus memanfaatkan sistem ini untuk memetakan area rawan penumpukan sampah, mengoptimalkan rute pengangkutan, serta menyusun laporan kinerja harian maupun mingguan secara otomatis. Dengan demikian, kebijakan ini bertujuan meningkatkan transparansi, koordinasi antarinstansi dan antara pemerintah dengan masyarakat, serta mempercepat respons terhadap permasalahan persampahan berbasis data. Namun, penerapan sistem ini memerlukan dukungan infrastruktur digital dan pelatihan bagi pengguna, serta berpotensi kurang inklusif bagi kelompok masyarakat lanjut usia atau warga yang belum memiliki literasi teknologi yang memadai.

4. Alternatif 4: Penegakan Regulasi dan Program Edukasi Berbasis Lingkungan

Alternatif kebijakan ini berfokus pada penguatan regulasi dan perubahan perilaku masyarakat melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kebersihan Kelurahan yang melibatkan aparat kelurahan, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga. Satgas bertugas melakukan patroli rutin, mengawasi kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah, serta memberikan teguran dan sanksi administratif kepada pelanggar. Upaya ini diperkuat dengan program edukasi lingkungan yang dilaksanakan di sekolah, rumah ibadah, dan komunitas warga guna membentuk budaya bersih, disiplin, serta menumbuhkan tanggung jawab kolektif dalam pengelolaan sampah. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan menginternalisasi nilai kebersihan sebagai budaya lokal yang berkelanjutan. Meskipun memiliki keunggulan berupa dasar hukum yang kuat dan efektivitas jangka panjang, implementasinya memerlukan komitmen politik yang tinggi, pengawasan yang konsisten, serta menghasilkan dampak yang cenderung tidak langsung terlihat dalam jangka pendek.

Analisis Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

Agar lebih mudah dalam memahami kelebihan dan kekurangan dari setiap pilihan kebijakan, berikut ini adalah tabel perbandingan yang dibuat berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2003), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Keenam kriteria ini digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan mampu mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara yang optimal dan berkelanjutan. Untuk mempertahankan objektivitas dalam penilaian, setiap kriteria dilengkapi dengan indikator yang memiliki skala penilaian dari 1 hingga 5, di mana angka 1 mencerminkan tingkat pencapaian yang sangat rendah dan angka 5 menunjukkan tingkat pencapaian yang sangat tinggi. Tabel berikut menjelaskan arti dari setiap nilai pada setiap kriteria, yang menjadi acuan dalam menilai empat alternatif kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Keramasan.

Tabel 1
Indikator Penilaian Setiap Kriteria

<i>Kriteria</i>	<i>Nilai 1</i>	<i>Nilai 2</i>	<i>Nilai 3</i>	<i>Nilai 4</i>	<i>Nilai 5</i>
<i>Efektivitas</i>	Tidak memberikan dampak terhadap pengurangan sampah	Memberikan dampak kecil yang tidak konsisten	Memberikan dampak sedang terhadap pengurangan sampah	Memberikan dampak besar pada beberapa wilayah	Memberikan dampak sangat cepat dan nyata mengurangi volume sampah secara luas
<i>Efisiensi</i>	Biaya sangat tinggi dan hasil kecil	Biaya besar dengan hasil belum sebanding	Biaya moderat dan hasil cukup baik	Biaya rendah dengan hasil optimal	Biaya sangat rendah, hasil maksimal dan cepat
<i>Kecukupan</i>	Hanya menyentuh sebagian kecil masalah	Menyelesaikan beberapa aspek tanpa menyentuh akar masalah	Menangani sebagian besar masalah namun	Hampir menyelesaikan seluruh aspek masalah	Sangat memadai, menjawab akar masalah secara menyeluruh

			belum menyeluruh		dan berkelanjutan
Pemerataan	Manfaat hanya dirasakan sebagian kecil masyarakat	Menjangkau beberapa wilayah tapi belum adil	Cukup merata di beberapa wilayah	Hampir semua wilayah terlayani	Merata dan adil di seluruh wilayah, menjangkau semua lapisan masyarakat
Responsivitas	Tidak menanggapi kebutuhan masyarakat	Respon lambat dan tidak menyeluruh	Respon cukup cepat tapi belum merata	Respon cukup cepat dan sesuai kebutuhan masyarakat	Sangat cepat dan adaptif, mampu menanggapi keluhan masyarakat secara berkelanjutan
Ketepatan	Tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal	Kurang sesuai dengan konteks sosial	Cukup sesuai tapi belum sepenuhnya relevan	Sesuai dan mudah diterapkan di kondisi lokal	Sangat tepat dan relevan, sesuai nilai sosial-budaya dan kondisi masyarakat

Berdasarkan indikator yang terdapat pada tabel sebelumnya, dilakukan analisis terhadap empat pilihan kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Keramasan. Tiap pilihan kebijakan dinilai menurut enam kriteria evaluasi yang dikemukakan oleh William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, dengan menggunakan skala penilaian 1-5 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana setiap alternatif dapat mengatasi masalah pengelolaan limbah secara menyeluruh dan realistis. Hasil dari penilaian tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2
Perbandingan Opsi Alternatif Kebijakan

Kriteria Evaluasi	Alternatif 1:	Alternatif 2:	Alternatif 3:	Alternatif 4:
	Infrastruktur Persampahan Terpadu	Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Digitalisasi Pengelolaan Sampah	Penegakan Regulasi & Edukasi Lingkungan
Efektivitas	5 - Dampak cepat dan nyata terhadap pengurangan sampah melalui penyediaan TPS dan TPS3R.	4 - Efektif dalam jangka panjang karena menumbuhkan kesadaran warga.	4 - Efektif untuk mempercepat respons dan koordinasi.	3 - Efeknya jangka panjang karena butuh waktu untuk perubahan perilaku.
Efisiensi	3 - Membutuhkan biaya besar untuk infrastruktur dan armada.	5 - Biaya rendah karena berbasis swadaya masyarakat.	4 - Hemat biaya operasional jangka panjang, tapi butuh investasi awal teknologi.	3 - Membutuhkan biaya pelatihan dan pengawasan berkelanjutan.

Kecukupan	4 - Memadai untuk mengatasi penumpukan sampah, tapi belum menyentuh perubahan perilaku.	4 - Cukup untuk menjawab akar masalah sosial dan lingkungan.	3 - Fokus pada pengawasan, belum menyelesaikan akar masalah sampah.	4 - Mampu memperkuat kepatuhan hukum dan kesadaran publik.
Pemerataan	3 - Fasilitas bisa tidak merata jika dana terbatas.	5 - Bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat.	4 - Merata secara akses digital, tapi terbatas bagi yang tidak melek teknologi.	4 - Dapat diterapkan di seluruh wilayah dengan dukungan aparat dan masyarakat.
Responsivitas	4 - Respon cepat karena sistem pengangkutan lebih tertata.	5 - Responsif karena melibatkan masyarakat langsung dalam pengelolaan.	5 - Sangat responsif dengan sistem pelaporan digital real-time.	3 - Respon lambat karena tergantung koordinasi manual antar pihak.
Ketepatan	4 - Tepat untuk menjawab masalah infrastruktur yang mendesak.	5 - Sangat tepat karena menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya lokal.	4 - Tepat untuk modernisasi pengelolaan sampah kota.	4 - Tepat untuk membangun kesadaran hukum dan budaya bersih.
Skor Total (1-5)	23	28	24	21
Rangking Akhir	3	1 (Terbaik)	2	2

Hasil analisis terhadap empat pilihan kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat adalah pilihan yang paling sesuai untuk diterapkan, dengan nilai tertinggi berdasarkan enam kriteria penilaian kebijakan menurut Dunn (2003). Kebijakan ini dianggap yang paling efektif, efisien, dan adil karena melibatkan partisipasi aktif warga dalam proses pemisahan, pengumpulan, serta pengolahan sampah secara mandiri dan berkelanjutan. Agar dampak kebijakan semakin kuat, penerapan metode ini perlu digabungkan dengan penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah yang terintegrasi serta program penegakan aturan dan pendidikan lingkungan, sehingga dapat terbentuk sistem pengelolaan sampah yang menyeluruh, responsif, dan fokus pada pengembangan lingkungan berkelanjutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan wawancara dengan 7 orang responden, terungkap bahwa semua responden mengungkapkan tidak adanya tempat pembuangan sampah sementara (TPS) atau TPS3R serta tidak tersedianya layanan pengangkutan sampah secara teratur di Kelurahan Keramasan. Keadaan ini mempengaruhi cara pengelolaan sampah rumah tangga yang kurang teratur, di mana 57% responden membuang sampah ke sungai secara langsung dan 43% memilih membakar sampah di saat air surut. Selain itu, hanya 29% responden yang memisahkan sampah sebelum dibakar, sementara 71% lainnya tidak melakukan pemisahan sama sekali. Walaupun seluruh responden mengakui adanya kegiatan gotong royong dalam menjaga kebersihan, pelaksanaannya sangat jarang dan tidak terorganisir. Temuan ini menunjukkan bahwa masalah utama dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Keramasan tidak hanya terkait dengan aspek teknis, tetapi juga bertalian dengan lemahnya koordinasi antar kebijakan dalam penyediaan infrastruktur, lembaga yang bertanggung jawab, dan partisipasi masyarakat. Dari analisis menggunakan kriteria evaluasi kebijakan yang

dikembangkan oleh William N. Dunn serta kerangka Integrated Sustainable Waste Management (ISWM), penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan partisipatif berbasis masyarakat adalah strategi yang paling sesuai untuk kawasan pemukiman di tepi sungai yang memiliki layanan formal terbatas, karena dapat menangani isu perilaku, efisiensi, dan keberlanjutan secara bersamaan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam merumuskan kebijakan di tingkat kelurahan dan kota dengan memperkuat bank sampah, membentuk kelompok swadaya masyarakat, mengintegrasikan penyediaan infrastruktur dasar, serta menerapkan regulasi yang lebih efektif, terutama di daerah pemukiman yang berada di sepanjang sungai seperti Kelurahan Keramasan. Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Lingkungan Hidup disarankan untuk menjadikan Kelurahan Keramasan sebagai area utama dalam pengembangan sistem pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat, dengan cara membentuk bank sampah dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), serta menyediakan fasilitas yang mendukung seperti tempat penampungan yang terpisah, alat untuk pengolahan sampah yang sederhana, dan pendampingan teknis secara berkala. Pihak pemerintah kelurahan sebaiknya merancang suatu mekanisme untuk koordinasi yang teratur antara RT/RW, tokoh masyarakat, dan petugas kebersihan agar pelaksanaan pemilahan sampah dari sumber rumah tangga dan jadwal pengangkutan sampah dapat dilaksanakan dengan lebih teratur. Kemudian untuk memastikan keberhasilan rekomendasi kebijakan, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dengan cara memilah sampah rumah tangga dan ikut dalam kegiatan pengelolaan sampah di komunitas sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap lingkungan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, T. (2024). STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH KOTA PALEMBANG UNTUK MENDUKUNG NET ZERO EMISSION. *Journal Of Plano Studies*, 1(2), 52–61. <https://doi.org/10.36982/jops.v1i2.4676>
- Deselta, A., & Nugroho, A. (2021). Analisis Pengelolaan Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Sukawinatan dalam Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang. *Jurnal Discretie*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.20961/jd.v2i1.52854>
- Dewi, A. C., & Al-Hamdi, R. (2021). FAKTOR-FAKTOR PENGARUH KEGAGALAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG LARANGAN PELACURAN DI KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 10(2), 303–314. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v10i2.1329>
- Diyah, H., Ramadani, T. P., Lutfi, D. K. R., Sulaeman, R., & Ariza, S. (2025). Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Tempat Penampungan Sementara Melalui Pendekatan Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Lingkup Kolaborasi di Kelurahan Petamburan. *Jurnal STIA LAN*.
- Environment, U. N. (2024, Januari 24). *Annual Report 2023 | UNEP - UN Environment Programme*. <https://www.unep.org/resources/annual-report-2023>
- Jayawisuda, E. P. (2025, Februari 13). *Palembang Kurangi Produksi Sampah 280 Ton per Hari, Tapi Armada Pengangkut Masih Kurang—Relung.id*. <https://relung.id/palembang-kurangi-produksi-sampah-280-ton-per-hari-tapi-armada-pengangkut-masih-kurang/>
- JDIH BPK. (2008, Mei 7). *Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39067/uu-no-18-tahun-2008>
- JDIH BPK. (2012, Oktober 15). *Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/5295/pp-no-81-tahun-2012>

- JDIH BPK. (2015, Juni 19). *Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/28381/perda-kota-palembang-no-3-tahun-2015>
- JDIH BPK. (2021, Juli 1). *Permen LHK No. 14 Tahun 2021*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/233754/permen-lhk-no-14-tahun-2021>
- JDIH Kementerian Keuangan. (2012, Oktober 15). *Definisi Tempat penampungan sementara* | JDIH Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/tempat-penampungan-sementara?id=07c6f020b5764af2f11ee9fcdbd5b1cf>
- Marlina. (2024). Pengelolaan sampah berbasis masyarakat untuk mendukung SDGs Tahun 2030 (Tujuan 11—Kota dan permukiman yang berkelanjutan) di Kota Makassar. *Jurnal Penelitian Geografi (GeoJPG)*, 3(2), 111–120. <https://doi.org/10.37905/geojpg.v3i2.28532>
- Nawang Sari, H. U., Rostyaningsih, D., & Lestari, H. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH (JAKSTRADA) DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN DEMAK. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(1), 1–14. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i1.42319>
- Purwendah, E. K., Rusito, & Aniek Periani. (2022). KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT. *JURNAL PACTA SUNT SERVANDA*, 3(2), 70–77.
- Puspandari, T., Taufik, M., & Putri, M. K. (2023). *PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP SAMPAH RUMAH (DOMESTIK) DI PINGGIRAN SUNGAI KECAMATAN KERTAPATI KELURAHAN KEMANG AGUNG KOTA PALEMBANG*. 8(1).
- Raditia, & Erlina, F. (2025). PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DALAM PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PEREMPUAN DI DESA RIBANG KECAMATAN MUARA UYA KABUPATEN TABALONG. *Jurnal Humaniora dan Sosial Sains*, 2(2), 286–291.
- SIPSN. (2024). *TIMBULAN SAMPAH TAHUN 2024*. <https://sipsn.kemenlh.go.id/sipsn/public/data/timbulan>
- Tuhumury, S., Laurens, S., & Tuanaya, W. (2024). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Manajemen Penanganan Sampah di Kota Ambon. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1704–1717. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2690>